

BAB V

KESIMPULAN

Salah satu pokok perbincangan yang hangat dalam koridor kehidupan berbangsa dan bernegara belakangan ini adalah kekerasan. Wacana itu muncul kepermukaan justru dilatarbelakangi oleh semaraknya tindakan kekerasan yang di jadikan oleh penguasa atau kelompok tertentu untuk melanggengkan kekuasaannya atau mewujudkan politiknya di masyarakat.

Tentu banyak sudut pandang yang bisa di jadikan pisau bedah untuk menelusuri dari mana sebenarnya sumber kekerasan yang terjadi terutama dalam peristiwa Talangsari pada tanggal 7 Februari 1989, dalam konteks kehidupan berbangsa di republik ini salah satu hal yang jelas bahwa munculnya kekerasan tidak lepas dari perwujudan kekuasaan. Artinya, kekerasan terjadi ketika kekuasaan dijadikan sebagai sarana pemecah masalah oleh penguasa dan dipakai untuk mempertahankan kelanggengan dan keamanan kekuasaannya itu sendiri, inilah yang dominan nampak pada masa pemerintahan Orde Baru.

Salah satu hal yang sangat menonjol selama kepemimpinan Soeharto adalah sentralisme kekuasaan. Pemusatan kekuasaan itu diberlakukan dalam seluruh tataran kehidupan berbangsa mulai dari bidang politik, sosial budaya hingga bidang ekonomi dan pendidikan. Disini segala gerak kehidupan rakyat di tentukan oleh satu komando, yakni kekuasaan pusat, siapapun yang menolak terhadap kebijakan tersebut akan berhadapan dengan kekuasaan yang pada

akhirnya pemegang kekuasaan menggunakan tindakan preventif dalam menangani masalah.

Telah banyak perubahan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik Indonesia pada dua dasawarsa terakhir setelah tragedi nasional tahun 1965 (Gerakan 30 September 1965). Militer muncul sebagai kekuatan nasional yang dominan dalam menentukan kembali struktur politik serta arah proses politik, dengan memainkan peran fungsi ABRI secara efektif. Militer berada di berbagai elemen seperti administrasi sipil, Dewan Perwakilan Rakyat, perusahaan-perusahaan, bahkan perkumpulan olahraga, hal ini menunjukkan semakin pentingnya peran mereka di balik berbagai kegiatan, dengan demikian dapat dikatakan kalau para pemimpin angkatan darat berpendapat bahwa pemerintah militer akan menjamin terpeliharanya kesetabilan politik yang dibutuhkan untuk pembangunan.

Namun tidak berarti Indonesia merupakan sebuah negara militer, karena kekuasaan yang ada di Indonesia diperoleh tidak dengan aksi militer, tetapi lebih melalui sebuah manuver politik yang canggih dan demokratis. Hal ini diperkuat dengan munculnya optimisme yang kuat di kalangan partai-partai politik yang pernah di larang pada masa pemerintahan Soekarno, khususnya di kalangan politisi partai Islam seperti Masyumi dan Partai Serikat Islam. Walaupun akhirnya pada tahun 1973 terjadi penggabungan seluruh partai Islam kedalam satu wadah partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan demikian ini bukan berarti di Indonesia tidak berlangsung kehidupan politik yang demokratis walaupun pada kenyataannya pemerintah memaksa semua partai

politik dan Golongan karya untuk menerapkan azas Pancasila sebagai satu-satunya landasan berfikir serta tujuan dari setiap organisasi.

Dari usaha untuk menerapkan Pancasila sebagai azas tunggal serta beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan umat Islam inilah yang pada akhirnya menimbulkan konflik antara umat Islam dengan pemerintah. Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, seringkali pemerintah menyelesaikannya dengan tindakan preventif sehingga menimbulkan korban dari pihak sipil yang cukup banyak. Peristiwa yang terjadi di Talangsari pada tanggal 7 Februari 1989 merupakan salah satu contoh konflik yang terjadi antara umat Islam dengan pemerintah yang pada akhirnya di selesaikan dengan tindakan preventif sehingga menimbulkan korban jiwa dari pihak jamaah setidaknya tidak kurang dari 246 orang meninggal dunia, puluhan orang di tahan dengan atau tanpa proses hukum, sebuah mushola serta beberapa rumah penduduk hangus terbakar beserta isinya. Pemerintah menuduh jamaah yang di pimpin oleh Warsidi telah bertindak subversif dengan berusaha mengganti Pancasila dengan Al-qur'an dan Al-hadist, hal ini dianggap telah membahayakan kesetabilisan keamanan nasional, sehingga menjadi suatu kewajiban jika pada akhirnya pemerintah menjustifikasi kelompok jamaah ini sebagai Komando Mujahidin Fisabilillah atau Gerakan Pengacau Keamanan. Dari pelabelan yang di berikan ini, para anggota jamaah dan keluarganya tidak saja mendapat intimidasi dari pemerintah namun juga dikucilkan oleh masyarakat serta hilangnya beberapa hak sipil lainnya.

Tindakan prpreventif yang di lakukan pemerintah terhadap jamaah pimpinan Warsidi menunjukkan adanya kekurang harmonisan antara kelompok

pengajian dengan aparat pemerintah. Namun sayangnya upaya untuk menyelesaikan masalah ditempuh dengan cara yang sangat tidak tepat, hal ini terlihat dari tidak adanya upaya pendekatan secara instan yang dilakukan oleh pihak pemerintah terutama departemen keagamaan atau dari organisasi lain seperti NU, PERSIS, Muhammadiyah dan kaum ulama. Mereka yang pernah melakukan dialog dengan jamaah pimpinan Warsidi hanyalah orang-orang yang terlalu munafik dan tidak layak menjadi utusan karena dalam kenyataannya mereka tidak melakukan dialog dengan baik apalagi melihat realita masyarakat yang ada di desa Talangsari, mereka hanya memberikan laporan-laporan yang menyudutkan para jamaah tanpa memberikan solusi yang lebih baik, bahkan ada kemungkinan mereka tidak hanya melaporkan bahwa pengajian yang di pimpin oleh Warsidi melakukan kegiatan yang "mencurigakan" namun juga sangat membahayakan dan tergolong kedalam gerakan sempalan, selain itu ada beberapa dari aparaturnegara yang sengaja terlibat dalam propokasi terhadap jamaah untuk menentang pemerintah.

Untuk menganalisa fenomena gerakan sempalan secara lebih jernih, mungkin ada baiknya kalau kita merujuk kepada kajian sosiologi agama yang sudah ada untuk melihat apakah ada temuan yang relevan untuk situasi Indonesia. Hanya saja, karena sosiologi agama adalah salah satu disiplin ilmu yang lahir dan dikembangkan di dunia Barat, sasaran kajiannya lebih sering terdiri dari umat Kristen ketimbang penganut agama-gama lainnya. Oleh karena itu belum tentu *a priori* temuannya benar-benar relevan untuk dunia Islam. Beberapa konsep dasar yang dipakai barangkali sangat tergantung pada konteks budaya Barat. Memang

sangat sulit untuk mengatakan bahwa Jamaah yang di pimpin oleh Warsidi merupakan gerakan sempalan, baik dalam arti bahwa mereka tidak dibenarkan oleh lembaga-lembaga agama resmi maupun dalam arti bahwa mereka memisahkan diri dari mayoritas. Namun selama penulis melakukan penelitian hingga membuat kesimpulan ini, penulis tidak pernah mendengar kritik mendasar terhadap aqidah dan ibadah mereka. Yang dianggap sesat oleh mayoritas umat adalah amal *politik* mereka. Seandainya pada tahun 1950-an bukan Republik yang menang tetapi *Negara Islam Indonesia*'nya Kartosuwiryo, merekalah yang menentukan ortodoksi dan membentuk "mainstream" Islam. Seandainya itu yang terjadi, tidak mustahil sebagian "mainstream" Islam sekarang inilah yang mereka anggap sebagai "sempalan" terutama lembaga-lembaga Islam yang secara terang-terangan menggunakan azas Pancasila sebagai landasan berfikir dan pedoman hidup secara jelas telah sangat menyimpang dari ajaran tauladan Muhammad Rasulullah Solallah Alaihiwasalam yang telah mewasiatkan kepada umat Islam untuk berpegang teguh pada Al-quran dan Al-hadist.

Peristiwa yang terjadi di Talangsari dapat kita ketahui melalui pemberitaan yang di lakukan oleh surat kabar baik surat kabar nasional maupun lokal, namun agaknya kita boleh sedikit kecewa dengan pemberitaan yang di lakukan oleh surat kabar baik *Kompas* maupun *Lampung Post*, karena informasi yang di berikan oleh kedua surat kabar tersebut sedikit berbeda dengan informasi yang di berikan oleh para pelaku (anggota jamaah) serta pemberitaan yang berkembang pada saat ini mengenai peristiwa 7 Februari 1989 di Talangsari. Realitas serta refleksi *kompas* dan *lampung post* tidak menggambarkan peristiwa yang sebenarnya. Ketika

dilacak kenapa hal ini sampai terjadi, alasannya sederhana; sumber berita yang *Kompas* dan *Lampung Post* gunakan hanya dari pihak yang mendukung pemerintah, sumber pemberitaan surat kabar tersebut diantaranya berasal dari sumber resmi yang di keluarkan oleh pemerintah, partai politik dan MUI, sehingga dalam pemberitaannya sangat menyudutkan kelompok pengajian ini. Kebijakan yang di lakukan oleh *Kompas* dan *Lampung Post* dalam pemberitaannya terutama mengenai peristiwa Talangsari dapatlah di pahami bahwa mereka mengambil "jalur aman", karena sejarah pers terutama pada masa Orde Baru sangat sarat dengan masalah pembredelan terhadap surat kabar yang terlalu kritis terhadap kebijakan pemerintah atau hanya karena memberitakan suatu masalah dan peristiwa yang sebenarnya.

Kita dapat membayangkan prospek masa datang surat kabar Indonesia dengan melihat pada perkembangan baru di negara ini secara global (perubahan pers di mulai pada masa reformasi). Dengan perkembangan baru itu surat kabar Indonesia bisa tampil dengan wajah baru, sesuai dengan standar yang berlaku secara universal. Tidak tampil seolah-olah ia menjadi perpanjangan tangan pemerintah.

Seharusnya tidak dapat di lupakan bahwa masyarakat sekarang semakin kritis. Bila mungkin, mereka ingin mengetahui lebih dahulu apa yang terjadi. Karena itu surat kabar dituntut tidak hanya menyajikan peristiwa yang sudah dan sedang berlangsung, tapi juga analisis dan interpretasi dari sebuah peristiwa. Artinya, surat kabar perlu memberitakan kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan analisis dan interpretasi terhadap fakta.

Kalau dulu penilaian baik dan buruknya suatu surat kabar diukur dari kemampuan dalam menyajikan berita yang membuat kejutan, sekarang tidak sepenuhnya begitu. Surat kabar akan mendapat pujian masyarakat bila mampu menyajikan informasi yang tepat. Surat kabar juga akan mendapat pujian bila dalam melakukan kontrol sosial tidak hanya mencari kelemahan satu hal tetapi melakukan evaluasi terhadap hal itu. Bila surat kabar tidak bisa melakukan evaluasi itu sepenuhnya, tidak ada salahnya "memelihara" kolonnis yang ahli dibidang itu, karena akhir-akhir ini, masyarakat lebih senang membaca analisis dan interpretasi para kolumnis mengenai suatu peristiwa.

Apapun perubahan yang dilakukan oleh surat kabar, ia harus mampu merefleksikan semua realitas sosial yang benar. Ia harus mampu menyuarakan segala kepentingan yang lahir dari sebuah sistem sosial. Untuk itu, surat kabar perlu senantiasa meningkatkan profesionalismenya. Profesionalisme itu setidaknya mengenai: *pertama*, teknik, yaitu keterampilan memformat realitas sosial empirik yang memenuhi *newsworthy* dan bermanfaat untuk masyarakat menjadi informasi; dan *kedua*, etika, yaitu setandar tindakan yang dipandang baik untuk membimbing keterampilan wartawan. Pada titik ini, etika menjadi hal tak terpisahkan dari profesionalisme surat kabar bertolak yang tentunya bertolak dari etika wartawan itu.